

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Indonesia akhirnya merdeka di tahun 1945, setidaknya dalam pengertian secara de facto dan mendapat pengakuan dari beberapa negara. Namun dalam sebuah negara yang merupakan bekas jajahan kolonialisme meninggalkan persoalan negeri. Hal ini menjadi tantangan besar dalam membangun sebuah negara yang berdaulat dan sejahtera. Dalam menghadapi dinamika tersebut, rakyat Indonesia bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin Indonesia untuk mengubah nasib bangsanya sendiri. Setelah masa revolusi, Indonesia menggunakan sistem demokrasi parlementer yang mengadopsi konsep demokrasi liberal.

Pemilihan Demokrasi Liberal merupakan bagian yang sangat penting untuk menjalankan sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan menjadi negara kesatuan setelah masa Republik Indonesia Serikat (RIS) menandai babak baru dalam periode pemerintahan bangsa Indonesia. Kesepakatan antara RIS dan RI untuk membentuk negara kesatuan disepakati pada tanggal 17 Mei 1950, yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan antara RIS dan RI. Isi Piagam tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak, RIS dan RI, akan bersama-sama dan dalam waktu sesingkat mungkin melaksanakan proses pembentukan negara kesatuan (Soepomo, 1950: 133-139). Setelah Indonesia menjadi Negara yang baru bersatu maka diterapkannya sistem pemerintahan liberal.

Masa demokrasi Liberal di Indonesia berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Sistem ini juga dikenal sebagai Demokrasi Parlementer, di mana negara

dipimpin oleh seorang perdana menteri bersama dengan seorang Presiden yang menjabat sebagai kepala negara. Parlemen memegang peranan penting selama masa Demokrasi Liberal, sebagai representasi rakyat dalam urusan politik negara. Selain itu, parlemen memiliki hak untuk mengkritik pemerintah jika tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Hal itulah yang menjadikan jabatan perdana menteri di masa ini sangat singkat.

Masa jabatan yang singkat ini membuat banyaknya kabinet yang pernah memimpin, terhitung ada 7 kabinet hanya dalam kurun waktu 9 tahun demokrasi liberal berjalan. Mulai dari kabinet Natsir hingga Djuanda semua punya permasalahan yang rumit, cepatnya peralihan kekuasaan membuat kebanyakan kebijakan tidak berhasil terlaksana dengan baik termasuk saat Kabinet Wilopo berkuasa. Wilopo adalah seorang Nasionalis yang menunjukkan Dedikasi perjuangan demi Kepentingan Bangsa. Hal ini sudah terlihat ketika Wilopo sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta, yaitu tempat melanjutkan pendidikan *Algemeene Middelbare School (AMS)*. Semenjak Ia menjadi pelajar di AMS membuat perubahan besar bagi Wilopo dan mendapat pikiran Nasionalisme tentang Bangsa Indonesia yang sedang dijajah oleh Belanda. Wilopo memandang Indonesia memiliki banyak kebudayaan yang beraneka ragam, khususnya di tempat pendidikannya di Yogyakarta. Selain itu Wilopo melihat bahwa dirinya merupakan anak jajahan yang terus menerus akan diperlakukan tidak wajar oleh Negara penjajah. Oleh karena itu Ia memiliki prinsip untuk terus berjuang dalam membela Tanah air Bangsa.

Sistem pendidikan yang didapat Wilopo menjadikan Ia memiliki semangat yang tinggi untuk memperjuangkan Bangsa dan Negeranya. Awal pemikirannya juga dipengaruhi oleh buku yang Ia baca semasa belajar di AMS Sukabumi. Waktu itu di Sukabumi sudah berdiri Partai Politik bernama Partindo. Seorang anggota Cabang Partindo yaitu Abdulrahman meminta agar Wilopo untuk ikut serta menjadi bagian dari Partindo. Beliau Melihat bahwa Wilopo seorang yang Intelektual dan berjiwa kritis. Karakter tersebut itulah yang terpenting untuk pimpinan pembentukan Kader Partindo. Melalui keaktifan Wilopo di politik membuat ia menjadi banyak dikenal masyarakat. Ia memegang peranan penting di kedudukan politik Indonesia. dimulai dari peranannya di awal kemerdekaan sebagai kepala badan usaha dalam penasehat politik panglima besar Sudirman yang menjalankan tugas sebagai ketua barisan pelopor untuk mempersiapkan gedung proklamasi di Pengangsaan. Dilanjut sebagai menteri perburuhan semasa kabinet Bung Hatta yang mengurus masalah buruh di Indonesia dan menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi pada saat itu.

Pada tanggal 25 April 1951, Wilopo resmi diangkat sebagai menteri perekonomian masa kabinet Sukiman. Tugas Wilopo sebagai menteri Perekonomian adalah meneruskan kebijakan dari kabinet sebelumnya. Setelah kabinet sukiman lengser, Wilopo dipilih menjadi perdana menteri berikutnya. Wilopo adalah anggota dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dibentuk oleh presiden Soekarno. PNI pasca kemerdekaan Indonesia menginginkan suatu bentuk partai yang dapat mengisi kemerdekaan, dengan pembangunan di segala sektor

seperti, pertahanan, perekonomian, sosial, dan politik yang merangkul seluruh elemen masyarakat (Cahyo Budi Utomo, 1995 :42). Namun nyatanya dalam membentuk suatu kabinet terdapat hubungan yang kurang harmonis antara pihak sipil dengan militer pada masa Kabinet Wilopo yang ditandai dengan peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa Tanjung Morawa.

Berbicara tentang hubungan sipil-militer, sejarah hubungan antara pihak sipil dan militer di Indonesia telah mengalami fluktuasi sepanjang sejarah, dimulai sebelum proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, terus berlanjut selama periode revolusi fisik (1945-1949), hingga masa penerapan sistem pemerintahan serikat (RIS) pada tahun 1949-1950. Hubungan ini terbentuk saat awal berdirinya organisasi militer di Indonesia. Dalam konteks ini militer baru mulai dibentuk dengan pembentukan tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Militer pada saat itu berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan melawan upaya kolonial Belanda untuk merebut kembali kendali atas Indonesia.

Namun, hubungan antara pemerintahan sipil militer menghadapi tantangan dan ketegangan saat periode awal kemerdekaan. Hal ini dipengaruhi oleh kekuasaan dan pengaruh politik yang kuat dan beberapa perwira militer memegang posisi penting di pemerintahan. Selain itu intervensi militer dalam politik juga sangat berpengaruh. Dimana beberapa kelompok militer berusaha mempengaruhi atau menggulingkan pemerintahan sipil. Perbedaan dalam pandangan ideologi tentang

strategi perjuangan untuk meraih kemerdekaan telah muncul di antara politisi sipil dan pejuang yang berperang secara militer.

Perbedaan pendapat ini menghambat pembentukan angkatan bersenjata setelah Indonesia merdeka. Sehingga, anggota militer terus mendorong para pemimpin negara untuk segera membentuk organisasi militer yang kokoh. Perubahan dalam konstitusi pemerintahan telah memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan berbangsa di Indonesia, termasuk dalam ranah militer, yang mengakibatkan penurunan peran politik militer dan bahkan menetapkan bahwa militer tidak boleh terlibat dalam urusan politik (Yulianto, 2002:219).

Pada masa penerapan sistem serikat di Indonesia, beberapa politisi nasional berupaya untuk menempatkan militer di bawah kontrol penuh pihak sipil atau *Civil Supremacy Beyond Military* (Singh, 1995:38). Ketika RIS berlangsung, politisi sipil juga berusaha untuk membatasi peran militer hanya sebagai alat pertahanan, sebagaimana yang terjadi di negara-negara Barat, terutama saat sistem pemerintahan serikat diterapkan di Indonesia, tanpa memberikan peran aktif dalam urusan politik yang sebelumnya mereka raih. Seiring dengan itu, upaya besar dilakukan untuk mengubah Angkatan Bersenjata menjadi sebuah entitas yang profesional.

Permasalahan sipil-militer bahkan berlanjut dan semakin memanas di masa demokrasi liberal khususnya periode kabinet Wilopo dimana terjadi dua peristiwa yang akhirnya menjatuhkan kabinet tersebut yaitu Peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa 17 Oktober 1952 dilatarbelakangi oleh

penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dianggap sebagai taktik DPRS untuk mempertahankan kedudukannya di tengah kondisi politik yang tidak stabil. Akibat dari penundaan pemilu, maka terjadi lah aksi demonstrasi rakyat mengejutkan di Jakarta. Aksi tersebut dilakukan di tempat gedung parlemen, dan setelah itu rakyat menuju ke Istana Presiden untuk menyampaikan tuntutananya. Isi tuntutananya yaitu menyuruh presiden Soekarno membubarkan DPRS dan diganti oleh DPRS yang baru. Hal tersebut disebabkan oleh kinerja DPRS pada periode 1950 an dianggap sudah tidak efektif lagi dan ikut campur dalam urusan militer.

Presiden Soekarno menjelaskan bahwa pemilihan umum memerlukan persiapan yang tidak sedikit. Ia juga menganggap bahwa membubarkan DPRS berarti menyerahkan kekuasaannya kepada kekuasaan eksekutif saja dari pemerintahan akan berarti menjadikan dirinya seorang diktator. Karena hal itu tidak sesuai dengan ideologi negara, maka ia harus menolak tuntutan demonstran itu, Soekarno lalu memerintahkan massa supaya bubar. Disaat bersamaan Presiden Soekarno menerima Delegasi Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kolonel A.H Nasution yang didampingi oleh T.B Simatupang. Kondisi tahun 1950an pasca revolusi digambarkan oleh Nasution sebagai bagian dari pencarian identitas, baik itu identitas mencari sistem kenegaraan yang lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia maupun mencari sistem ketentaraan yang sesuai dengan kepribadian dan kondisi masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan (Nasution, 2013, hlm. 12-14).

Hal tersebut mendapat pro dan kontra dikalangan masyarakat terutama pada masa Kabinet Wilopo yaitu diawali dengan surat Kol. Bambang Supeno yang secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasan kepada pimpinan tentara. Adapun penyebab Kol. Bambang Supeno bertindak demikian, antara lain bahwa Tuduhan-tuduhan ini harus dilihat dengan mengingat kritik-kritik yang telah dilontarkan Bambang Supeno beserta sekolah perwira Tjandradimuka yang dipimpinnya. Dapat ditafsirkan bahwa buruknya hubungan sipil dan militer disebabkan oleh adanya sikap saling curiga satu sama lain yang dianggap saling melakukan intervensi, menimbulkan tidak adanya rasa percaya diantara keduanya. Hal tersebut dapat dipahami bahwasanya persoalan internal militer tidak dapat diselesaikan di ruang internal militer, akan tetapi persoalan tersebut semakin meluas di muka publik seperti halnya masuk ke dalam sidang pleno parlemen. Sehingga hal tersebut menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan.

Permasalahan Militer dengan Sipil juga terjadi pada peristiwa Tanjung Morawa, pada 16 Maret 1953. Peristiwa Morawa terjadi di Desa Perdamaian, Sumatera Timur. Hal ini dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya Mosi Sidik Kertapati pada bulan Mei. Sidik Kertapati sendiri adalah perwakilan dari Sarekat Tani Indonesia (SAKTI). Usaha pembebasan tanah ini ternyata mendapat perlawanan dari penduduk dan akhirnya terbentuklah gerakan sosial antara Petani yang ingin merebut kembali hak nya dengan pemerintahan Sipil yang menggunakan alat kekuasaan Negara untuk memindahkan wilayah penduduk dari lokasi tanah tersebut. Dari kedua peristiwa tersebut dapat kita ketahui bahwa hubungan sipil-

militer masa Kabinet Wilopo sangat tidak harmonis, ketidakharmonisan hubungan ini membuat stabilitas nasional semakin memburuk. Wilopo yang gagal mengatasi masalah tersebut akhirnya harus rela mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis perlu menganalisis ketegangan hubungan sipil-militer pada masa kabinet Wilopo di Indonesia. Masa kabinet Wilopo yang berlangsung dari 1952 hingga 1953, merupakan periode yang menarik dalam sejarah Indonesia karena mencerminkan dinamika kompleks antara pemerintahan sipil dan militer. Dalam penelitian ini, penulis akan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi ketegangan tersebut. Dengan memahami konteks historis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan sipil-militer di Indonesia dan kontribusinya terhadap pemahaman kita tentang dinamika politik dan kekuasaan di negara ini.

A. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan dalam sub-bab dasar pemikiran, muncul ketertarikan dari diri penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang Hubungan Sipil-Militer pada masa Kabinet Wilopo tahun 1952-1953. Pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi oleh aspek spasial dan aspek temporal. Dalam batasan spasial atau keruangan penelitian ini dibatasi pada aspek politik terutama

pada kebijakan Kabinet Wilopo yang mempengaruhi hubungan antara sipil dan militer di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji akar permulaan ketegangan hubungan sipil-militer sampai puncaknya memanas di masa Kabinet Wilopo yang ditandai Peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa Tanjung Morawa.

Batasan temporal (waktu) yang dipilih adalah 1952 sampai 1953. Tahun 1952 dipilih karena Wilopo diangkat menjadi perdana menteri dan memulai kerjanya di tahun tersebut, selain itu terdapat peristiwa yang berkaitan dengan hubungan sipil-militer yakni Peristiwa 17 Oktober 1952 yang akan penulis analisis. Sementara tahun 1953 dipilih karena tahun tersebut lah Wilopo akhirnya lengser dari jabatannya sebagai perdana menteri, di tahun tersebut pula ada Peristiwa Tanjung Morawa yang diduga menjadi salah satu faktor terkuat jatuhnya Kabinet Wilopo.

2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis mendalam terkait dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketegangan hubungan sipil-militer pada masa kabinet Wilopo. Penelitian ini berusaha mencari jawaban atas masalah tersebut. Permasalahan ini dapat dirinci dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan konflik antar sipil militer terjadi?
2. Mengapa pada periode Wilopo, hubungan sipil-militer mengalami ketidakharmonisan?
3. Bagaimana upaya kabinet Wilopo dalam menyelesaikan masalah hubungan sipil-militer yang semakin meregang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan analisis komprehensif terhadap dinamika dan faktor-faktor tersebut, penelitian lebih lanjut bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kompleksitas dan ketegangan hubungan sipil-militer pada era kabinet Wilopo di Indonesia. Temuan-temuan penelitian tersebut dapat memberikan pencerahan mengenai dinamika politik dan perebutan kekuasaan di dalam negeri, sehingga berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan sipil-militer dan dampaknya terhadap stabilitas politik dan pembangunan nasional.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan serta keilmuan dalam kajian studi Pendidikan Sejarah, khususnya pada materi Sejarah Indonesia masa awal kemerdekaan dimana dalam proses demokrasi di Indonesia terjadi ketegangan antara sipil dan militer terutama saat masa demokrasi liberal Kabinet Wilopo. Dengan menganalisis faktor-faktor ketegangan dalam dinamika hubungan sipil militer pada masa kabinet Wilopo, maka penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang dapat digunakan untuk memperkaya dan memperbaiki teori dan kerangka pemikiran yang ada dalam studi hubungan sipil-militer. Temuan dan metodologi penelitian ini dapat menginspirasi peneliti lain untuk menjalankan penelitian lebih lanjut dalam konteks yang serupa atau membandingkan dengan periode di negara lain,

sehingga memperluas pemahaman kita tentang hubungan sipil-militer secara umum.

Sementara itu manfaat secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti bagi dosen dan akademisi lain di bidang sejarah khususnya dalam studi Sejarah Indonesia masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal.

D. Metode dan Sumber

1. Metode Penelitian

Dalam sebuah tulisan ilmiah pastilah diperlukan yang namanya metode agar tulisan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sesuai tema dari tulisan ini yang membahas tentang hubungan sipil-militer masa Kabinet Wilopo, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri atas 5 tahap (Kuntowijoyo,2013) antara lain yaitu: pemilihan topik, heuristik atau pencarian sumber, verifikasi atau kritik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menjabarkan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang akan penulis lakukan sebagai berikut :

a. Pemilihan Topik

Dalam memilih sebuah topik aspek yang harus penulis perhatikan adalah keterjangkauan dan ketersediaan sumber karena sebuah sejarah tidak terlepas dari adanya sumber sejarah. Pada tema yang penulis pilih, ketersediaan sumber terbilang cukup banyak mengingat Wilopo adalah tokoh yang pernah menjadi perdana

menteri Indonesia saat itu, pastinya banyak sumber tertulis yang membahas mengenai Wilopo baik berupa buku, arsip, dan karya ilmiah lain.

Mengenai keterjangkauan juga cukup mudah menjangkau sumber-sumber yang tadi penulis sebutkan, penulis kebetulan tinggal di Jakarta yang dekat dengan berbagai perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Cikini ada juga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Oleh karena hal tersebut penulis cukup yakin memilih tema mengenai hubungan sipil-militer pada masa Kabinet Wilopo.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topik adalah punya kedekatan emosional ataupun kedekatan intelektual. Penulis memiliki kedekatan intelektual mengenai tema yang penulis pilih. Selain sudah mempelajari sejarah Indonesia masa Demokrasi Liberal sejak di SMA lalu diperdalam di kampus, penulis juga sebelumnya pernah membaca beberapa referensi yang berkaitan dengan tema penelitian ini seperti buku "Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo dan Ahmad Soebardjo".

b. Heuristik

Heuristik merupakan langkah pertama dalam menyusun sebuah penelitian sejarah. Di dalam tahap ini peneliti akan mencari dan mengumpulkan sumber untuk dijadikan sebagai amunisi untuk menulis. Terdapat dua sumber yang digunakan dalam tahapan ini, yaitu sumber sekunder dan juga primer. Sumber sekunder dimulai dari karya ilmiah berupa artikel jurnal, buku, tesis, arsip, serta berbagai

macam sumber lisan lainnya, sedangkan untuk sumber primer dalam penelitian ini bisa berupa koran atau majalah yang terbit pada masa Demokrasi Liberal, bisa juga berupa arsip dan surat-surat penting mengenai konflik hubungan sipil dan militer hingga peran Wilopo dalam mengatasi permasalahan seperti Surat Pernyataan Bambang Supeno (Lih.Lampiran 5) dan juga Gambar terkait pada masa Kabinet Wilopo.

Dari beberapa sumber tersebut penulis juga menghimpun berbagai buku yang terkait dalam hubungan sipil militer, Buku Demilitarisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004 karya Abdoel Fattah, Buku Politik Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwi Fungsi ABRI Karya Ulf Sundhaussen, Buku Memenuhi Panggilan Tugas karya A.H Nasution, dan Buku Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia Karya Yahya A. Muhaimin. Penulis juga mendapatkan bahan sumber dari hasil pencairan yang ada di laman internet berupa tesis, skripsi dan juga artikel jurnal ilmiah. Pertama adalah sebuah tesis dari H.N Kamil, “Militer Dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI Dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998”, kedua adalah M. Rusli Karim berjudul, “Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut” , ketiga dari Putranto Argi Noviantoko. “*Peran Nahdlatul Ulama di Partai Masyumi pada Tahun 1945-1952* dan Skripsi dari Ony Widiarto, “ Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950.

c. Kritik Sumber

Tahapan selanjutnya setelah pengumpulan sumber adalah verifikasi atau melakukan kritik terhadap sumber. Pada tahap ini dibagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah melakukan verifikasi terhadap keaslian sumber atau otentisitas, sementara kritik internal adalah berkaitan dengan isi dari sumber atau menguji kredibilitas. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, kritik eksternal atau menguji otentisitas sumber maka bisa dilakukan dengan melihat bentuk fisik sumber yang diuji. Misalnya adalah koran dan majalah yang terbit di masa Demokrasi Liberal bisa dilihat dari kertas atau media yang digunakan, bisa dilihat apakah bentuknya masih utuh atau hanya sebagian. Sementara untuk menguji kredibilitas atau kritik internal bisa dilakukan perbandingan atau komparasi antara satu sumber dengan sumber yang lain.

d. Interpretasi

Selanjutnya setelah menguji sumber-sumber sejarah adalah melakukan tahap interpretasi. Sumber sejarah yang sudah layak digunakan kemudian akan ditafsirkan oleh penulis. Dalam tahap ini juga dibagi menjadi dua yaitu analisis dan sintesis, analisis adalah menguraikan dan sintesis adalah menggabungkan. Dalam tahap analisis, penulis akan menguraikan hubungan sipil-militer di Indonesia masa Kabinet Wilopo, sementara itu di tahap sintesis penulis akan menggabungkan sesuai urutan tahun agar tercipta tulisan yang kronologis.

Sebagai contoh penulis menguraikan hal-hal yang menjadi faktor merengangnya hubungan sipil dan militer seperti Peristiwa Kudeta 3 Juli, hasil perundingan seperti

Perjanjian Renville dan lainnya. Selain itu penulis juga mengurutkan beberapa peristiwa yang berhubungan dengan sipil dan militer secara kronologis mulai dari pembentukan hingga puncak konflik di masa Kabinet Wilopo. Tafsiran ini tentunya mengacu pada dasar literatur yang telah penulis baca salah satunya buku karya Fatah "Demiliterisasi Tentara; Pasang Surut Politik Militer".

e. Historiografi

Setelah selesai melaksanakan semua tahapan di atas maka tahapan terakhir dalam penelitian sejarah adalah penyusunan serta mengkonstruksi berbagai macam fakta sejarah untuk dijadikannya rangkaian tulisan sejarah. Peneliti wajib untuk mengerti penulisan sejarah dengan benar dan sesuai pada kaidah ilmu sejarah. Penulisan sejarah sangat berpengaruh untuk bahan sumber nantinya, peneliti juga wajib memperhatikan struktur dan gaya penulisan supaya tulisan dapat dipahami oleh orang yang membaca tulisannya. Tulisan sejarah dibuat menjadi satu kesatuan yang sistematis dan logis dalam mewujudkan narasi yang kronologis hingga menjadi karya ilmiah yang bermanfaat.

2. Bahan Sumber

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Untuk sumber-sumber tersebut penulis akan mengumpulkan dari beberapa tempat seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Cikini, Ruang Baca Sejarah prodi Pendidikan Sejarah UNJ, Arsip Nasional Republik Indonesia dan juga sumber dari

internet. Beberapa sumber yang berhasil penulis himpun adalah berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah, skripsi dan tesis, serta artikel internet.

Beberapa sumber yang telah berhasil penulis himpun diantaranya, buku "Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo dan Ahmad Soebardjo" karya Ghazali dkk, buku "Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa" karya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, buku "Pengantar Ilmu Sejarah" karya Kuntowijoyo dan buku "Pemilu di Indonesia" karya Topo Santoso, buku "PNI dan Kepolitikannya" karya Nazaruddin Sjamsuddin, dan buku "Politik Militer Indonesia" karya Ulf Sundhaussen. Selain buku ada juga karya tulis lain seperti jurnal "Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal 1949-1959" karya Paizon Hakiki, skripsi "Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif di Indonesia Pada masa Kabinet Wilopo dan Upaya Melawan Gerakan Separatisme" karya Marcellinus, skripsi "Indonesia pada Masa Pemerintahan Kabinet Wilopo (1952-1953)" karya Joko Maryono, jurnal "Dwi Fungsi ABRI: Asal-Usul Akulturasi dan Implikasinya bagi Stabilitas Pembangunan" karya Bilveer Singh serta beberapa sumber internet lain.